



Bali Post



Dewan Sebut Eksekutif "Bengkung"

Silpa APBD Perubahan Capai Rp 199 Miliar

Mangupura (Bali Post) -

Besarnya sisa anggaran yang belum terpakai di suatu daerah atau silpa (sisa lebih perhitungan anggaran), mengindikasikan kinerja pemerintah tersebut belum berjalan maksimal. Seperti yang terjadi di Kabupaten Badung, silpa pada APBD Perubahan 2015 di Kabupaten Badung mencapai Rp 199 miliar. Kondisi tersebut membuat kalangan Dewan khususnya di Komisi III DPRD Badung mangkel. Pasalnya, pihak legislatif telah mengarahkan eksekutif untuk menolkan silpa sesuai Permendagri No. 37/2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015.

"Ini karena eksekutif yang *bengkung* (bandel). Kami Komisi III sudah mengarahkan agar silpa dinolkan, tetapi mereka tidak mau," ujar Nyoman Satria, Minggu (11/10) kemarin.

Menurutnya, sisa anggaran sebesar Rp 199 miliar saat ini merupakan silpa tahun 2014 sebesar Rp 934

miliar. Pihaknya telah berusaha keras agar tidak terjadi silpa. Salah satunya melalui rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Namun, eksekutif beralih waktu belanja sangat singkat. Untuk membelanjakan uang Rp 199 miliar, eksekutif mengaku cukup kesulitan. "Silpa sebesar Rp 199 mil-

tandasnya.

Menyikapi pernyataan Dewan Badung itu, eksekutif melalui Kabag Humas Setda Badung A.A. Raka Yuda mengatakan, eksekutif tidak bisa grasa-grusu membelanjakan uang. Terlebih, uang yang dibelanjakan dalam jumlah

besar.

"Selama ini pemerintah menganut konsep berbasis kinerja. Jadi, belanja harus dirancang pada orientasi kepentingan masyarakat. Masyarakat harus menikmati langsung," jelasnya.

Terkait penyertaan dana

Silpa di BPD, diakui Raka Yuda, dapat dilakukan atau tidak, karena dibutuhkan kajian dan kerangka berpikir secara mendalam. "Tidak mudah mempertanggungjawabkan uang itu. Namun, kami yakin ini bisa dijalankan dengan baik," tandasnya. (kmb27)

iar bisa dinolkan dengan dimasukkan dalam penyertaan modal BPD. Sebab, selama ini Pemkab Badung masih mempunyai peluang menambah modal Rp 300 miliar di BPD," terangnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menceritakan, Pemkab Badung sebelumnya memiliki kesempatan menyertakan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sebesar Rp 600 miliar, dan telah dibayar Rp 300 miliar. "Sekarang kurang Rp 300 miliar, daripada bingung membelanjakan, kami minta dimasukkan peny-

ertaan modal saja. Tetapi eksekutif tak mau, ya... sudah," ketusnya.

Satria menegaskan, dengan kondisi saat ini maka eksekutif sudah jelas-jelas melanggar Permendagri No. 37/2014. Selain melanggar Permendagri, eksekutif juga berpeluang menemui masalah di belakang hari. "Silpa sebesar itu (Rp 199 miliar - red) hampir pasti menjadi temuan BPK di masa berikutnya. Sebab, sesuai amanat Permendagri, harusnya silpa nol. Tetapi eksekutif sudah melanggar. Dewan sudah menyarankan,"

Edisi : Senin, 12 Oktober 2015

Hal : 3



Macet, Hibah Rp 5,7 Miliar kepada Petani

Amlapura (Bali Post) -

Kalangan petani makin dipersulit. Selain harus berjuang menghadapi kekeringan, petani harus merelakan hibah yang sudah diprogramkan tak bisa dicairkan alias macet. Kondisi itu terkait dampak dari terbitnya Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Karangasem Nyoman Mertha Tanaya, Minggu (11/10) kemarin, mengatakan sebagaimana diketahui dari UU itu pada Pasal 298 ayat 5, dijelaskan penerima hibah bansos harus berbadan hukum. Hal ini semakin diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran (SE) dari Mendagri dengan Nomor 900/4627/SJ tentang Penajaman Ketentuan Pasal 298 ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. "Terbitnya UU ini tidak adil bagi petani," terang Mertha Tanaya. Kalau penerima

hibah harus berbadan hukum, jelas kalangan petani tidak bisa memenuhi syarat itu. Hibah Dinas Pertanian ini rencananya dipakai untuk pengadaan bantuan bibit kepada petani. Selain itu, juga pengadaan bantuan pupuk, jalan usaha tani hingga alat-alat pengolahan lahan pertanian bagi petani. Semua bantuan yang rencananya diserahkan kepada kelompok tani tahun ini, akhirnya tak bisa direalisasikan. Dari anggaran hibah di Dinas Pertanian Tananam Pangan dan Hortikultura, sudah termasuk DAK (Dana Alokasi Khusus) untuk

Dinas Pertanian. Agar anggaran tersebut bisa dimanfaatkan, Mertha Tanaya mengatakan pihaknya sempat mengalihkan penggunaan anggarannya pada pemberdayaan petani. Yakni berupa peningkatan SDM, pengembangan demplot percontohan.

Selain itu, anggaran hibah ini diarahkan ke sejumlah kegiatan. Namun, anggaran yang terserap dari upaya itu hanya Rp 800 juta. "Dari anggaran hibah Rp 5,7 miliar, hanya bisa dimanfaatkan Rp 800 juta. Sisanya dipastikan bakal jadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran)," katanya. Atas kondisi

ini Ia menyampaikan kelompok petani yang sudah dijanjikan untuk menerima bantuan sangat kecewa. Bahkan hingga tahun 2016 pihaknya masih bingung memikirkan situasi ini. Sebab, regulasinya yang tidak memihak para petani ini belum diketahui bakal berlaku sampai tahun berapa.

Ia berharap regulasi yang ada saat ini bisa diubah agar memihak kepada petani. Pasalnya, sebanyak 47% masyarakat Karangasem berprofesi sebagai petani. Bahkan produk pertanian di Karangasem mampu menggerakkan 80% masyarakat Karangasem. Bila produk hasil pertanian terganggu, jelas ini akan mengganggu persediaan konsumsi dari produksi pertanian masyarakat Karangasem. (kmb31)



Bali Post/gik

Nyoman Mertha Tanaya

Edisi : Senin, 12 Oktober 2015

Hal : 13



Pasamuhan Sabha Walaka PHDI

Reklamasi Teluk Benoa Jadi Bahasan

PASAMUHAN Sabha Walaka PHDI, Minggu (11/10) kemarin, membahas beberapa permasalahan Bali. Salah satunya terkait reklamasi Teluk Benoa. Kajian Dr. Sugi Lanus tentang kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan suci menjadi salah satu pijakan. Selanjutnya, Sabha Walaka PHDI akan menjadikan kajian Sugi Lanus sebagai masukan untuk Sabha Pandita PHDI. "Teluk Benoa kita angkat dalam pasamuhan karena masalah itu kan ramai di masyarakat. Tetapi Pasamuhan Sabha Walaka hanya sifatnya badan pertimbangan, bukan memutuskan (menolak atau mendukung reklamasi Teluk Benoa - red). Keputusan nanti

Sabha Pandita, kita harapkan di Pandita juga tidak beda arahnya bahwa Teluk Benoa adalah kawasan suci, berarti harus dilindungi dan tidak boleh diutak-atik," ujar Ketua Sabha Walaka PHDI Pusat Putu Wirata Dwikora.

Pertemuan dibuka Ketua Umum Pengurus Harian PHDI Pusat Mayjen TNI (Purn) SN Suwisma, Sabtu (10/10). Suwisma dalam sambutannya mengatakan rapat kerja dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PHDI di setiap perjalanan kepengurusan yang ada. Ia menjelaskan, pokok penyelenggaraan rapat kerja membahas dan mem-

persiapkan penyelenggaraan rapat kerja akbar (mahasabha) yang akan dilakukan pada waktu mendatang.

Sementara itu, kajian Sugi Lanus antara lain menyebut kawasan Teluk Benoa sebagai titik temu *parahyangan* dan *campuhan agung* sehingga sangat disucikan oleh umat Hindu. Teluk Benoa juga dikelilingi sedikitnya 18 titik suci atau pura. Kawasan ini juga tercatat menjadi titik temu *sekala-niskala* kawasan Tanjung Benoa, Jimbaran, Kelan, Tuban, Pesanggaran, Benoa, Serangan dan Sanur. Belum lagi ada pura di dalam laut yang disebut Pura Dalem Segara.

Alumnus Sastra Bali Unud ini menambahkan, sejumlah teluk di Bali selain Teluk Benoa sedang menjadi incaran investor karena keindahannya. Sebut saja Teluk Pegatepan, Teluk Terima, dan Sendang di bagian utara Bali. Kalau para pandita dan sulinggih membiarkan terjadinya konversi di Teluk Benoa, maka hal serupa juga akan terjadi di teluk lainnya. Sugi mengaku tidak bisa membayangkan bila semua teluk di Bali boleh di-urug.

"Memang di Bali itu semua kawasannya suci. Yang harus kita pertimbangkan lebih jauh nilai intrinsiknya. Apakah itu nilai spiritual yang tidak tergantikan. Saya pikir Bali sudah

cukup, tinggal kualitas kemanusiaan yang lebih penting, bukan ekspansinya. Pada prinsipnya, kita harus berpikir holistik jangan menggampangkan. Kita perlu hati-hati karena urusan di Bali tidak seperti Singapura. Di sini faktor *niskala*-nya 50 persen," tandasnya.

Di tempat terpisah, pengamat sosial Viraguna Bagoes Oka menyatakan semua komponen Hindu harus kembali merenungkan serta *eling* pada semangat serta pemikiran luhur dari para pemrakarsa, perintis serta pendiri PHDI (sebelumnya Parisada Hindu Bali).

Hal. 19
Tempat Pertemuan



Tempat Pertemuan

Dari Hal. 1

Ketika itu sekitar 55 tahun lalu seperti mendiang Residen Bali-Lombok Provinsi Nusa Tenggara/Pj. Gubernur Pertama Bali I Goesti Bagoes Oka, Dekan Fakultas Sastra Udayana cabang Universitas Airlangga Dr. Ida Bagus Mantra, Kepala Kantor Agama Bali I Gusti Bagus Sugriwa, Tjokorda Gde Agung Sukawati, Ida Pedanda Made Kemenuh dari kalangan sulinggih, serta perintis lainnya menyelenggarakan pasamuhan pertama pendirian Parisada di Tjampuhan.

Tjampuhan atau *sanggam*, pertemuan sungai-sungai di hulu Bali, ibaratnya Rshikesh dan Gangotri tempat pertemuan hulunya sungai-sungai yang membentuk Sungai Suci Gangga di India, menjadi pilihan tepat sebagai mahasabha pertama itu. Karena Tjampuhan adalah dulunya tempat patokan utama para rishi Bali yang mencari *kashidhian*/kesempurnaan realisasi pembebasan kemanunggalan *Kawula ing Gusti*.

Begitulah semangat dari para perintis agar Parisada selalu ingat pada khitah, tujuannya yaitu menjadikan *moksa* (pembebasan) tujuan utama dari para rishi dan *sadhu* Bali di Tjampuhan, Ubud (Ulubudha), Bedulu (Budhulu) zaman dulu -- yang sesuai pula dengan *Catur Purusa Artha* umat Hindu

Sanatana Dharma.

Sebagian besar masyarakat Bali dan para pemimpinnya kini sudah *lipya* pada tujuan utama ini (yang sebenarnya sudah dipertegas dengan *mahavakya: mokshaartham jagat hitaya ca* yang arti populernya adalah bila pembebasan spiritual dijadikan tujuan kesejahteraan jagat akan tercipta dengan sendirinya. Atau dengan kata lain apabila para pemimpin dan pejabatnya menjadikan pembebasan (spiritual) tujuan mereka, maka rakyat dan pengusaha akan adem serta mengikuti teladan sikap seperti *Raja Rsi* itu.

Tjampuhan juga dulu merupakan tempat menyepi, *retret* para rishi. Namun sekarang, gua-gua para rishi bukannya dihidupkan lagi, malah disumbat dan di-*urug* untuk dibangun penginapan atau hotel di atasnya.

Beginilah keadaan serta tantangan yang dihadapi Bali dan umatnya sekarang. Khususnya perairan Bali Sselatan kaki Bali yang sakral supersuci, apalagi untuk dilakukan peng-*urug*-an laut Teluk Benoa yang alami nan holistik dan dikemas dengan istilah reklamasi yang menyesatkan dan jelas membohongi masyarakat awam dengan janji-janji muluk yang semata-mata adalah bentuk eksploitasi alam Bali dengan dalih ekonomi yang berbasis kerakusan semata. (kmb32)

Edisi : Senin, 12 Oktober 2011

Hal : 49



Tersangka Kasus SPPD Fiktif

Hari Ini, 14 PNS Dihadirkan di Kejari

Gianyar (Bali Post) -

Tercatat 14 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Gianyar yang menjadi tersangka dalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif akan dihadirkan di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar, hari ini, Senin (12/10). Kedatangan mereka untuk proses tahap kedua, yakni penyerahan berkas dari Polda Bali ke Kejaksaan Tinggi Bali hingga pelimpahan ke Kejari Gianyar. Meski demikian, belum dipastikan apakah akan dilakukan penahanan terhadap belasan tersangka tersebut.

Kepala Kejari Gianyar Ketut Sumadana, Minggu (11/10) kemarin, mengatakan proses penyerahan berkas kasus SPPD fiktif dengan 14 tersangka tersebut, pertama akan dilakukan dari Polda Bali ke Kejati Bali. Selanjutnya akan langsung dilakukan pelimpahan ke Kejari Gianyar. Termasuk menghadirkan 14 tersangka yang masih tercatat sebagai PNS aktif di Pemkab Gianyar tersebut ke Kantor Kejari Gianyar. "Kalau tahap dua, sudah pasti tersangka harus semua hadir, disertai dengan berkas perkara dan barang bukti," tegasnya.

Menurut Sumadana, bila semua sudah dilimpahkan ke Kejari Gianyar, maka jajarannya akan melanjutkan dengan proses pemeriksaan tersangka untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan oleh penuntut umum Kejati Bali dan Kejari Gianyar.

Dia menambahkan, sampai



Bali Post/nik

Ketut Sumadana

saat ini belum ada pertimbangan untuk langsung menahan para tersangka. Sebab, setelah penyerahan dari Polda Bali, sepenuhnya kasus SPPD fiktif tersebut langsung di bawah wewenang Kejati Bali. "Kalau kasus saya sudah pasti (ditahan - red) dan tidak ada perbedaan

dengan kasus lain selama ini. Cuma kasus ini kan di bawah kewenangan Kejati Bali, jadi kami masih menunggu pertimbangan," ujarnya.

Selain itu, mengenai adanya 10 tersangka baru dalam kasus ini, Ketut Semadana mengatakan jajarannya masih menunggu penyerahan selanjutnya dari Polda Bali, jika sudah dipastikan 10 tersangka baru yang menurut informasi juga masih tercatat sebagai PNS di lingkungan Pemkab Gianyar itu. "Kami hanya menunggu penyerahan dari Polda, belum tahu kapan tahap selanjutnya. Sebaiknya dikonfirmasi ke Polda," katanya.

Diberitakan sebelumnya, belasan tersangka SPPD fiktif masih tercatat sebagai PNS aktif di lingkungan Pemkab Gianyar, khususnya dari kantor Dispenda (Dinas Pendapatan Daerah) Kabupaten Gianyar. (kmb35)

Edisi : Senin, 12 Oktober 2015

Hal : 9